



Islamic Management and Leadership in the PKS Party Organization (Communication Process between Leaders and Members, Communication Principles, Communication Barriers, Use of Oral, Written and Verbal Communication) in Padangsidempuan

Pija NAPITUPULU*, Syafnan, Siti Rahma DONGORAN, Subuh Waldo HUAKBAR

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

*Corresponding author: pijanapitupulu991@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the principles of communication applied in the organization, identify barriers that arise during the communication process, and analyze the use of written and oral communication. The research method used in qualitative research with a focus on phenomena. The findings of the study indicate that communication is an important aspect of all social interactions, especially when people have strong ties with each other. The Prosperous Justice Party is a political party with a strong communication approach that includes mass, social, group, personal, and democratic communication. PKS uses various communication models to engage the public, including mass media, social media, group communication, door-to-door communication, and democratic communication. The Social Justice Party also uses the principles of social communication, such as the active participation of the general public, the use of contemporary media, and democratic communication. This strategy helps the Social Justice Party increase public trust, increase cadre loyalty, and achieve effective political goals. The integration of the principle of da'wah into all political activities ensures that all efforts are not only to protect the political environment but also to promote and integrate the general public with Islamic principles. Public communication is an important component of the Social Justice Party's Communication strategy. The final step in the Social Justice Party's reform process is the development of a clear and structured program for the general public. This approach ensures that the Social Justice Party effectively communicates its values and interests to the public, ultimately resulting in better public relations and governance.

Keywords: Islamic Management, Islamic Leadership, Social Justice Party, Communication Process.

Manajemen dan Kepemimpinan Islam di Organisasi Partai PKS (Proses Komunikasi Pimpinan dan Anggota, Prinsip Komunikasi, Hambatan

Komunikasi, Penggunaan Komunikasi Lisan, Oral Dan Tertulis) di Padangsidempuan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki prinsip-prinsip komunikasi yang diterapkan dalam organisasi, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses komunikasi, dan menganalisis penggunaan komunikasi tertulis dan lisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan fokus pada fenomena. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dari semua interaksi sosial, terutama ketika orang memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik dengan pendekatan komunikasi yang kuat yang mencakup komunikasi massa, sosial, kelompok, pribadi, dan demokratis. PKS menggunakan berbagai model komunikasi untuk melibatkan publik, termasuk media massa, media sosial, komunikasi kelompok, komunikasi pintu-ke-pintu, dan komunikasi demokratis. Partai Keadilan Sosial juga menggunakan prinsip-prinsip komunikasi sosial, seperti partisipasi aktif dari masyarakat umum, penggunaan media kontemporer, dan komunikasi yang demokratis. Strategi ini membantu Partai Keadilan Sosial meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan loyalitas kader, dan mencapai tujuan politik yang efektif. Integrasi prinsip dakwah ke dalam semua kegiatan politik memastikan bahwa semua upaya tidak hanya untuk melindungi lingkungan politik tetapi juga untuk mempromosikan dan mengintegrasikan masyarakat umum dengan prinsip-prinsip Islam. Komunikasi publik merupakan komponen penting dari strategi Komunikasi Partai Keadilan Sosial. Langkah terakhir dari proses reformasi Partai Keadilan Sosial adalah pengembangan program yang jelas dan terstruktur untuk masyarakat umum. Pendekatan ini memastikan bahwa Partai Keadilan Sosial secara efektif mengomunikasikan nilai-nilai dan kepentingannya kepada publik, yang pada akhirnya menghasilkan hubungan masyarakat yang lebih baik dan tata kelola.

Kata Kunci: Manajemen Islam, Kepemimpinan Islam, Partai Keadilan Sosial, Proses Komunikasi.

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh pengurus Partai PKS Padangsidempuan dan teman sejawat saya yang telah membantu dalam penelitian ini.

Untuk kutipan :

Napitupulu, P., Syafnan, Dongoran, S. R., & Huakbar, S. W. (2024). Manajemen Dan Kepemimpinan Islam Di Organisasi Partai PKS (Proses Komunikasi Pimpinan Dan Anggota, Prinsip Komunikasi, Hambatan Komunikasi, Penggunaan Komunikasi Lisan, Oral Dan Tertulis) di Padangsidempuan. *Radinka Journal of Science and Systematic Literature Review*. 3(3): 386-397.

Pendahuluan

Menurut (Akpaprep et al., 2019), Keberadaan kepemimpinan dalam manajemen merupakan sesuatu yang sangat membantu dalam bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa anggota kelompok akan menjadi pemimpin, sedangkan sebagian besar yang lain akan berpartisipasi. Kondisi ini didasarkan pada pengamatan bahwa banyak karyawan atau anggota staf ingin melihat orang lain yang dapat mendorong, memotivasi, mendukung, dan memantau berbagai kegiatan yang mereka lakukan di tempat kerja. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai tindakan seorang pemimpin dalam

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi semua anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Artinya, hasil kerja seorang pemimpin atau pegawai mampu memenuhi tujuan organisasi. Salah satu faktor terpenting dalam memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif adalah kemampuan dan semangat mereka. Pengaruh seorang pemimpin sangat menentukan arah tujuan dari organisasi, karena untuk mencapai tujuan organisasi, perlu menggunakan pendekatan yang konsisten dalam mengelola lingkungan kerja. Tugas dan tanggung jawab kepemimpinan Islam merupakan perintah, mirip dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya untuk membimbing manusia agar mereka dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya kehidupan. Oleh karena itu, siapa pun yang memimpin suatu kelompok atau komunitas akan selalu mampu mengekspresikan diri dan berupaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan (Fallah Shayan et al., 2022).

Pemimpin memiliki tujuan untuk memotivasi karyawan, memfasilitasi proses organisasi, memastikan komunikasi yang efektif, melakukan pengawasan yang teratur, dan memengaruhi perilaku mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peran kepemimpinan memiliki posisi yang strategis di dalam suatu organisasi (Khan et al., 2020). Manajemen pendidikan Islam adalah proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan mereka secara efisien dan efektif dengan menangani tujuan pembelajaran dan masalah terkait lainnya. Kata "manajemen" berasal dari bahasa Inggris dan merupakan terjemahan langsung dari kata "manajemen," yang berarti "pengelolaan," "ketata laksanaan," atau "tata pimpinan." Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris, Manajemen berasal dari kata "manajemen" yang berarti menuntun, menuntun, melaksanakan, menuntun, dan melaksanakan. Menurut (Castañer & Oliveira, 2020) al-tadbir (pengaturan) sama dengan hakikat manajemen.

Manajemen pendidikan Islam dapat dipisahkan secara jelas dari fungsi-fungsi manajemen pada umumnya yang diuraikan oleh (Martela, 2022) seorang profesional industri prancis, yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah mengorganisasikan, mengelola, mengkoordinasikan, dan mengatur. Setelah itu, Gagasan Fayol digunakan sebagai buku kerja untuk manajemen pendidikan yang dimulai pada tahun 1950-an dan berlanjut hingga saat ini. Di sisi lain fungsi manajerial yang paling penting adalah pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengarahan. Dengan demikian, (Zada et al., 2023) menyatakan bahwa fungsi manajemen atau kepemimpinan dalam melaksanakan tugas meliputi beberapa aspek, meliputi perencanaan, pengorganisasian pengarahan, dan pengawasan. Dalam buku Pengantar Manajemen menjelaskan kepemimpinan (leadership) itu merupakan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan (directing) dan mempengaruhi (influencing) para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Komunikasi sangat penting bagi manajemen dan kepemimpinan Islam dalam organisasi, dengan tujuan untuk menumbuhkan saling pengertian dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara semua anggota. Setiap organisasi dapat berfungsi dengan lancar jika ada komunikasi yang efektif. Di sisi lain, jika komunikasi kurang atau tidak ada, organisasi tetap dapat terbentuk. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam komunikasi organisasi sangat penting karena kepemimpinan merupakan salah satu hasil utama keberhasilan organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan gagasan dari suatu sumber ke suatu tujuan (Tri Astuti, 2020). (Seipp et al., 2023) Sumber berita dan tempat tujuan dalam proses komunikasi merupakan opini manu

sia. Berita-berita yang ditampilkan di sini misalnya berupa kesan-kesan, uraian suatu

hal, atau buah pikiran. Wujud berita dapat diartikan sebagai perintah, permohonan, pertanyaan, atau pernyataan lainnya. Agar mampu memimpin, seorang pimpinan harus memiliki tiga kompetensi utama, yaitu 1) mendiagnosis, 2) beradaptasi, dan 3) berkomunikasi.

Keterampilan diagnostik merupakan kemampuan kognitif yang dapat membantu Anda memahami situasi Anda saat ini dan apa yang diharapkan dari Anda di masa mendatang. Kemampuan untuk menyesuaikan perilaku seseorang dengan lingkungannya dikenal sebagai kemampuan beradaptasi. Sebaliknya, keterampilan komunikasi terkait dengan kemampuan individu untuk menjelaskan ide-ide dengan jelas dan ringkas sehingga orang lain dapat memahaminya. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, komunikasi yang efektif sangat penting bagi semua pemimpin karena terkait dengan manajemen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam organisasi PKS (proses komunikasi untuk karyawan dan karyawan, prinsip-prinsip komunikasi, hambatan komunikasi, dan penggunaan bahasa tertulis, lisan, dan tertulis).

Salah satu partai politik di Indonesia yang berlandaskan Islam adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejak berdiri pada 20 Juli 1998, PKS telah berupaya mengembangkan manajemen dan kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan dan misi partai. PKS juga menerapkan prinsip-prinsip ini dalam struktur organisasi dan kegiatannya (Rofhani & Fuad, 2021). Partai Keadilan Sejahtera, yang sering dikenal sebagai PKS, adalah sistem kepercayaan Islam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, partai keadilan juga dikenal sebagai partai dakwah, yaitu partai politik yang dalam praktiknya menjunjung tinggi misi dakwah. Sebagai komponen dakwah, ia menjadi tantangan tersendiri bagi para kadernya. Padahal, akidah Islam harus selalu dijunjung tinggi dalam praktik pemerintahan. Sejak berdiri, sejumlah profesional dan mahasiswa telah menyatakan minatnya terhadap kehadiran Partai tersebut. Mereka menilai keberadaan PKS merupakan ancaman baru dalam dunia politik dengan tujuan, gaya komunikasi, dan metode yang berbeda. Hingga saat ini, mereka menyatakan bahwa PKS bekerja dengan tujuan dakwah, yaitu bekerja keras untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada akhirat dan ketenangan duniawi (Rahbari Ghazani & Uysal, 2023). Kebijakan PKS secara konsisten mendorong akhlakul karimah. PKS secara konsisten mengabaikan keselarasan dalam masalah politik dan agama. Partai Keadilan Sejahtera dikenal sebagai militernya para kader. Dalam rangka pengembangan militer dan partisipasi para kader, PKS selalu mempertimbangkan aspek-aspek pengembangan dan pemahaman para kader, baik melalui kegiatan sehari-hari, kegiatan bulanan, maupun kegiatan tahunan. Hal ini cenderung membuat banyak orang geram ketika sebuah partai politik mampu menunjukkan solidaritas di antara para anggotanya.

Melalui komunikasi yang intens, PKS secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan di antara para anggotanya. Penekanan yang lebih besar harus diberikan pada metode antarpribadi, yang dianggap sebagai salah satu komponen kunci untuk memastikan persatuan dalam suatu kelompok. Seperti halnya partai politik lainnya, partai-partai yang disebutkan di atas hampir hadir di seluruh Indonesia. Ini termasuk DPP, DPW, DPD, dan DPC. Dewan perwakilan Partai Keadilan Sejahtera sering kali memiliki dewan perwakilan di kabupaten atau kota yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan partai di tingkat daerah. Ini dikenal sebagai dewan perwakilan daerah (DPD), dan contoh terbaiknya adalah DPD PKS Kota Padangsidimpuan.

Dalam pengelolaan partai, PKS menggunakan prinsip dakwah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Dakwah ini tidak hanya berlandaskan pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Di sisi lain, PKS dipimpin oleh pribadi-pribadi yang memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan anggotanya. Mereka berupaya meningkatkan komunikasi dan kerukunan antara Kader dan masyarakat setempat. Melalui inisiatif ini, PKS berharap dapat meningkatkan kerja sama politik dan kontribusi bagi pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, manajemen dan kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di JL. Sori Pada Mulia, No. 50 A, Sadabuan Padangsidimpuan Utara, Sumatera Utara, memiliki karakteristik yang sejalan dengan visi, misi, dan prinsip-prinsip yang dianutnya, yaitu berpusat pada prinsip-prinsip Islam, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan umat, serta

membangun organisasi yang tangguh, akuntabel, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat luas, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek operasinya.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan fokus pada fenomena. Fenomenologi mengacu pada analisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang-orang yang hadir. Tradisi ini menawarkan wawasan penting tentang persepsi dan interpretasi orang-orang terhadap pengalaman mereka sendiri. Fenomenologi memandang komunikasi sebagai proses yang melibatkan pengembangan pertumbuhan pribadi melalui dialog atau percakapan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang manajemen dan kepatuhan Islam pada PKS di JL. Sori Pada Mulia, No. 50 A, Sadabuan Padangsidempuan Utara, Sumatera Utara, meliputi observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pikiran, perasaan, dan persepsi mereka tentang gaya manajemen dan kepemimpinan Islam pada organisasi PKS di Padangsidempuan. Observasi partisipatif dilakukan oleh peneliti secara aktif, berinteraksi dan mendengarkan partisipan, jam kerja mereka, dan karyawan PKS. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang tersedia di kantor PKS, seperti surat menyurat, laporan kegiatan, laporan keuangan, atau dokumen lain yang terkait dengan manajemen PKS dan kepemimpinan Islam. Untuk memperoleh informasi tentang efektivitas dan efisiensi manajemen serta kepemimpinan berdasarkan dokumen resmi. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan berbagai pertanyaan tertulis yang diberikan kepada pengurus PKS yang merupakan responden paruh waktu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data awal ini bersumber dari sumber pertama, yaitu ketua dan wakil partai peserta. Sedangkan data kedua bersumber dari sumber-sumber yang sudah ada, yaitu penelitian terdahulu, buku, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Diskusi

1. Proses Komunikasi Pimpinan dan Anggota

Komunikasi merupakan dasar dari semua hubungan sosial. Jika orang telah menjalin hubungan tetap, sistem komunikasi yang mereka gunakan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat menguntungkan atau merugikan mereka, mengurangi ketegangan atau menimbulkan masalah jika muncul (Nguyen et al., 2022); (Van Ruler, 2018). Terkenal sebagai kader, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki gaya komunikasi yang menarik. Dalam hal ini, PKS memiliki saluran komunikasi di mana satu individu dapat berkomunikasi secara aktif dengan individu lainnya. Untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka melalui interaksi, anggota dan kader PKS memiliki pola timbal balik (umpan balik) selama interaksi.

Dalam komunikasi, kita menjalin hubungan saling pengertian, ide, pemikiran, dan sikap perilaku laku dengan orang lain. Komunikasi politik merupakan salah satu komponen komunikasi dalam organisasi politik (Juswil et al., 2022). Hal ini dapat dilihat dari jenis-jenis komunikasi politik yang juga terdapat dalam komunikasi organisasi, seperti komunikasi internal dan eksternal, komunikasi vertikal dan horizontal, komunikasi satu arah dan dua arah, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Selain itu, PKS menggunakan paradigma komunikasi linier dalam interaksi antara peserta dan pimpinan. Dalam paradigma ini, pesan disampaikan dari pimpinan (seperti pembina atau murabbi) kepada kader melalui saluran yang terstruktur.

Prosesnya berjalan lancar, dimulai dari visi partai dan diakhiri dengan pemahaman kader terhadap nilai-nilai partai. Ada beberapa model komunikasi linier dalam interaksi antara pimpinan dan anggota sebagai berikut:

- a. Komunikasi Antarpribadi: Kader PKS menggunakan metode door-to-door untuk melakukan komunikasi diam-diam dengan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan pribadi dan secara halus memengaruhi aspirasi masyarakat umum.
- b. Kelompok Komunikasi: Rutinitas rutin digunakan untuk membahas isu-isu terkini dan strategi partai. Dalam forum ini, para kader disajikan dengan informasi yang relevan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat umum.
- c. Media massa dan media sosial: PKS juga menggunakan media massa dan media sosial untuk menyebarluaskan pesan-pesan politik. Penggunaan media ini penting untuk menarik lebih banyak pemirsa yang memperhatikan dan menciptakan citra partai yang positif.

2. Prinsip Komunikasi Partai Keadilan Sosial

Sebagai partai politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sistem komunikasi yang kuat. Studi ini mengkaji prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan oleh PKS dalam berinteraksi dengan masyarakat umum dan para kader, serta bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi strategi politik partai. Prinsip-prinsip komunikasi Partai Keadilan Sejahtera berpusat pada komunikasi terbuka, pengabdian kepada masyarakat, penggunaan media kontemporer, dan dakwah. Melalui strategi-strategi ini, PKS berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat loyalitas para kader, dan secara efektif mencapai tujuan-tujuan politiknya. Menurut studi ini, komunikasi yang efektif merupakan komponen kunci keberhasilan PKS dalam memelihara perdamaian dalam politik Indonesia (Widian et al., 2023). Ada beberapa prinsip komunikasi partai keadilan sosial dipadangsimpulkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi Interpersonal: PKS mengedepankan komunikasi langsung antara kader dengan masyarakat melalui metode door-to-door. Pendekatan ini bertujuan untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung, sehingga kader dapat menyampaikan pesan pihak dengan lebih personal dan efektif
 - b. Keterlibatan Masyarakat: PKS menerapkan prinsip partisipasi aktif dari masyarakat. Kader tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pendengar yang aktif dalam berdialog dengan konstituen. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara partai dan masyarakat
 - c. Penggunaan Media Sosial: Di era digital, PKS memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pelatihan bagi kader dalam penggunaan media sosial menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi dan membangun citra partai
 - d. Pendekatan Dakwah: PKS memasukkan prinsip dakwah ke dalam semua kegiatan komunikasi politiknya. Artinya, setiap wacana tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk mendidik dan menyatukan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
 - e. Komunikasi Publik: PKS melakukan komunikasi publik melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan umum dan media sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas partisipasi di masyarakat umum.
- c. Rekrutmen dan Sosialisasi: Proses rekrutmen anggota

baru dilakukan melalui program-program partai yang jelas dan terstruktur sehingga masyarakat umum memahami visi dan misi PKS.

- f. Komunikasi Terbuka: PKS memfasilitasi komunikasi terbuka antara peserta dan pemangku kepentingan serta masyarakat umum, yang memungkinkan adanya diskusi diam-diam tentang kebijakan dan program yang sedang dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prinsip komunikasi Partai Keadilan Sejahtera berfokus pada komunikasi terbuka, pengabdian kepada masyarakat, penggunaan media kontemporer, dan dakwah. Melalui strategi-strategi ini, PKS berupaya meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat loyalitas kader, dan secara efektif mencapai tujuan politiknya. Menurut penelitian ini, komunikasi yang efektif merupakan komponen kunci keberhasilan PKS dalam menjaga perdamaian dalam politik Indonesia.

3. Hambatan Komunikasi

Temuan kajian tentang masalah komunikasi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik (Klinger, 2024); (Kamil & Indah, 2022); (Knüpfner et al., 2024). Berikut ini beberapa poin penting tentang hambatan tersebut:

- a. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat: Kajian ini mengidentifikasi bahwa maraknya partisipasi politik massa, khususnya di daerah seperti Tangerang Selatan, merupakan salah satu tantangan utama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara PKS dan masyarakat umum, yang membuat masyarakat kurang bersedia untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- b. Komunikasi yang Tidak Efektif: Komunikasi politik sering kali gagal melibatkan lebih banyak khalayak yang tertarik. Menurut kajian ini, terdapat kesenjangan dalam pesan antara masyarakat dan peserta, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PKS.
- c. Isu Sensitif: Sebagai partai oposisi, PKS menghadapi kritik dalam menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Isu-isu seperti pembatasan harga BBM dan RUU Cipta Kerja kerap menimbulkan reaksi publik yang negatif, sehingga menghambat komunikasi yang konstruktif.
- d. Pemanfaatan Media Sosial: Meski PKS telah memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media ini masih tergolong gencar. Kader-kader PKS diharapkan lebih aktif dalam menanggapi dan membagikan informasi di platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas partisipan.
- e. Faktor Internal Partai: Hambatan juga muncul dari dalam organisasi itu sendiri, seperti sulitnya melatih kader untuk menggunakan media komunikasi secara efektif. Hal ini menyoroti kesulitan dalam mengekspresikan diri dan membina hubungan dengan masyarakat umum.
- f. Persepsi publik: Persepsi negatif terhadap partai politik secara umum berpotensi mengganggu efektivitas komunikasi PKS. Ketika masyarakat umum bersikap skeptis terhadap partai politik, hal itu dapat menghambat upaya PKS untuk membangun kepercayaan publik.

Hambatan komunikasi di PKS mencakup faktor eksternal seperti tingkat partisipasi publik dan isu-isu sensitif, serta faktor internal seperti penggunaan media sosial dan pelatihan kader yang belum optimal (Kruk et al., 2018). PKS harus mengatasi masalah ini dengan strategi yang lebih matang dan mendorong partisipasi aktif dari semua peserta dalam proses komunikasi dengan masyarakat umum untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.

4. Komunikasi Lisan, Oral dan Tertulis

Hasil penelitian mengenai komunikasi lisan, lisan, dan tertulis di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan berbagai strategi dan metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan politik serta interaksi dengan anggota dan masyarakat. PKS menggunakan kombinasi komunikasi tertulis, lisan, dan tulisan untuk mencapai tujuan politiknya. Sekalipun terdapat kendala tertentu, upaya peningkatan efektivitas komunikasi menunjukkan bahwa PKS berkomitmen untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan anggotanya dan masyarakat. Kajian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya strategi komunikasi terpadu dalam memperkuat posisi partai dalam politik Indonesia (Kristiyanto et al., 2023); (Rakhmani & Saraswati, 2021). Berikut ringkasan temuan dari penelitian tersebut di atas:

a. Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan PKS memfasilitasi komunikasi terbuka antara kader dan masyarakat melalui berbagai forum seperti Pertemuan Rutin. Kader PKS secara rutin berkumpul dengan peserta untuk membahas isu-isu terkini, mengembangkan strategi partai, dan memengaruhi aspirasi masyarakat. Hal ini menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan umpan balik. Kampanye Selama kampanye pemilu, komunikasi lisan digunakan untuk menjelaskan program-program partai kepada pelanggan dengan cara yang jelas dan ringkas. Pesan yang dijelaskan biasanya berfokus pada nilai-nilai partai dan solusi untuk masalah-masalah masyarakat.

b. Komunikasi Oral

Komunikasi lisan di PKS memfasilitasi diskusi dan perdebatan: Dalam kegiatan dakwahnya, PKS menggunakan ceramah sebagai panduan untuk menjelaskan ide-ide politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Diskusi kelompok juga diadakan untuk mendidik masyarakat tentang strategi politik dan isu-isu sosial. Media Sosial, Penggunaan platform media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan audiens secara santai, bertukar informasi, dan menanggapi pertanyaan secara langsung.

c. Komunikasi Tertulis

Materi komunikasi PKS seperti Materi Kampanye: PKS menggunakan berbagai materi tertulis, seperti brosur, pamflet, dan poster, untuk menyampaikan informasi tentang program-programnya. Tujuan dari materi ini adalah agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Berita Resmi dan Rilis Pers: Untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan kelompok, sikap terhadap isu tertentu, dan prestasi yang telah dicapai, PKS juga menyebarluaskan informasi resmi dan pers.

Kesimpulan

Komunikasi merupakan aspek penting dari semua interaksi sosial, dan ketika individu memiliki koneksi, sistem komunikasi mereka dapat menentukan apakah komunikasi tersebut dapat membantu atau menghambat kemajuan mereka. Sistem Komunikasi Politik (PKS) merupakan

komponen utama dari proses ini, yang melibatkan berbagai saluran komunikasi dalam organisasi, termasuk internal, eksternal, vertikal, horizontal, dan verbal, serta model komunikasi linier antara para pihak. Proses ini berkelanjutan, mulai dari memberikan visi yang jelas hingga memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang nilai-nilai perusahaan. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip komunikasi sosial di Partai Islam (PKS) dalam berinteraksi dengan publik dan masyarakat lokal, menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi strategi politik partai, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan loyalitas, dan mencapai tujuan politik yang efektif. mengenai hambatan komunikasi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik seperti Keterbatasan Partisipasi Masyarakat, Komunikasi yang Tidak Efektif, Isu-isu Sensitif dan Penggunaan Media Sosial. strategi dan metode yang digunakan oleh Partai Rakyat Indonesia (PKS) untuk menyampaikan pesan-pesan politik dan berinteraksi dengan publik, dengan menekankan pentingnya strategi komunikasi terpadu dalam meningkatkan posisi politik mereka.

Konflik kepentingan

Penelitian ini memiliki rasa independensi yang kuat. Peneliti tidak memiliki hubungan pribadi, finansial, atau profesional dengan pengurus partai PKS. Setiap wawancara dilakukan dengan tujuan tunggal untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Tidak ada tekanan atau arahan khusus dari organisasi partai PKS atau entitas lain yang berdampak pada proses penelitian. Pengamatan langsung di lapangan juga dilakukan dengan perhatian cermat terhadap detail untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh secara akurat menggambarkan realitas manajemen dan kepemimpinan manajemen dan kepemimpinan islam di organisasi partai PKS (proses komunikasi pimpinan dan anggota, prinsip komunikasi, hambatan komunikasi, penggunaan komunikasi lisan, oral dan tertulis) di Padangsidempuan. Setiap hasil dianalisis, dianalisa, dan disajikan secara objektif tanpa interpretasi yang merugikan satu pihak tertentu. Dalam setiap langkah proses penelitian, peneliti bersedia melakukan semua penyesuaian yang diperlukan. Setiap partisipan menerima penjelasan yang komprehensif tentang tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan bagaimana data akan digunakan. Dengan melakukan hal ini, peneliti memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan tidak terpengaruh oleh persepsi yang signifikan. Semua dokumen resmi dari organisasi partai PKS yang digunakan dalam penelitian, seperti arsip internal, diakses dan dianalisis menggunakan respectful yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan operasi bisnis. Peneliti juga menegaskan bahwa data ini hanya akan digunakan untuk tujuan akademis, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh organisasi partai PKS. Meskipun peneliti telah berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, selalu ada kemungkinan konflik dalam lingkungan akademis. Namun, dalam penelitian ini, tidak disebutkan faktor keuangan, politik, atau afiliasi yang dapat memengaruhi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip komunikasi yang diterapkan dalam organisasi partai PKS. Jika hasil penelitian ini ditafsirkan secara berbeda saat ini, peneliti cukup bersemangat untuk membahasnya secara akademis dan profesional. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat tanpa bias yang disebabkan oleh konflik kepentingan.

Referensi:

Akparep, J. Y., Jengre, E., & Mogre, A. A. (2019). The Influence of Leadership Style on Organizational Performance at TumaKavi Development Association, Tamale, Northern Region of Ghana. *Open Journal of Leadership*, 08(01), 1–22. <https://doi.org/10.4236/ojl.2019.81001>

- Castañer, X., & Oliveira, N. (2020). Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review. *Journal of Management*, 46(6), 965–1001. <https://doi.org/10.1177/0149206320901565>
- Fallah Shayan, N., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). *Sustainability*, 14(3), 1222. <https://doi.org/10.3390/su14031222>
- Juswil, A. K., Nofrima, S., & Saputra, H. A. (2022). Political Communication Patterns through Social Media: A Case of an Indonesian Presidential Staff Twitter Account. *CommIT (Communication and Information Technology) Journal*, 16(2), 203–212. <https://doi.org/10.21512/commit.v16i2.7889>
- Kamil, I., & Indah, D. (2022). Political Communication Education for Beginner Voters in Convenient Regional Head Elections in 2024. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(2), 855–868. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3767>
- Khan, H., Rehmat, M., Butt, T. H., Farooqi, S., & Asim, J. (2020). Impact of transformational leadership on work performance, burnout and social loafing: A mediation model. *Future Business Journal*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s43093-020-00043-8>
- Klinger, U. (2024). Political Communication in Challenging Times. *Political Communication*, 41(5), 866–869. <https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2395084>
- Knüpfer, C., Jackson, S. J., & Kreiss, D. (2024). Political Communication Research is Unprepared for the Far Right. *Political Communication*, 41(6), 1009–1016. <https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2414268>
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12), e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., Adeyi, O., Barker, P., Daelmans, B., Doubova, S. V., English, M., García-Elorrio, E., Guanais, F., Gureje, O., Hirschhorn, L. R., Jiang, L., Kelley, E., Lemango, E. T., Liljestrand, J., ... Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196–e1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3)
- Martela, F. (2022). Managers matter less than we think: How can organizations function without any middle management? *Journal of Organization Design*, 12(1–2), 19–25. <https://doi.org/10.1007/s41469-022-00133-7>
- Nguyen, M. H., Gruber, J., Marler, W., Hunsaker, A., Fuchs, J., & Hargittai, E. (2022). Staying connected while physically apart: Digital communication when face-to-face interactions are limited. *New Media & Society*, 24(9), 2046–2067. <https://doi.org/10.1177/1461444820985442>
- Rahbari Ghazani, R., & Uysal, S. (2023). Rūmī's Asceticism Explored: A Comparative Glimpse into Meister Eckhart's Thought. *Religions*, 14(10), 1254. <https://doi.org/10.3390/rel14101254>
- Rakhmani, I., & Saraswati, M. S. (2021). Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 436–460. <https://doi.org/10.1177/18681034211027885>
- Rofhani, R., & Fuad, A. N. (2021). Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 156–173. <https://doi.org/10.1177/1868103421989076>

- Seipp, T. J., Helberger, N., De Vreese, C., & Ausloos, J. (2023). Dealing with Opinion Power in the Platform World: Why We Really Have to Rethink Media Concentration Law. *Digital Journalism*, 11(8), 1542–1567. <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2161924>
- Tri Astuti, M. (2020). Communication Strategy in Promoting Cultural Tourism Destinations in Semarang City. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i12.7606>
- Van Ruler, B. (2018). Communication Theory: An Underrated Pillar on Which Strategic Communication Rests. *International Journal of Strategic Communication*, 12(4), 367–381. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1452240>
- Widian, R., Satya, P. A. N. I. P., & Yazid, S. (2023). Religion in Indonesia's Elections: An Implementation of a Populist Strategy? *Politics and Religion*, 16(2), 351–373. <https://doi.org/10.1017/S1755048321000195>
- Zada, M., Khan, J., Saeed, I., Zada, S., & Yong Jun, Z. (2023). Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. *Heliyon*, 9(5), e15543. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15543>